

# BELA NEGARA SEBAGAI METODE PENCEGAHAN ANCAMAN RADIKALISME DI INDONESIA

## DEFEND THE STATE AS A METHOD TO PREVENT THE THREAT OF RADICALISM IN INDONESIA

Raden Mas Jerry Indrawan<sup>1</sup> dan Efriza<sup>2</sup>

UPN Veteran Jakarta & Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara  
(jerry\_indrawan18@yahoo.co.id)

**Abstrak** – Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme jika diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana program bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia.

**Kata Kunci :** bela negara, radikalisme, dan pertahanan negara

**Abstract** – Terrorism, rooted in radical movement post 9/11 event in the United States, began to grow rapidly also in Indonesia. Radical movements, especially those based on religion, evolved into terrorist movements that threaten state security and defense. Civic education is part of the implementation of state defense and security system. Radicalism, both as a movement and an ideology or a growing notion among Indonesians, is a threat to the state, that has a non-conventional nature. Therefore, civic education can be a program that can change people’s culture to put the love of the nation and the country as the main thing, thereby preventing the development of radical movements and ideology in Indonesia. The elements of religiosity (religion) can also play an important role in counteracting the threat of radicalism if it is integrated into the civic education curriculum. This paper will look at how civic education program can be used as a means of preventing the threat of radicalism in Indonesia.

**Keywords:** civic education, radicalism, and state defense

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di UPN Veteran Jakarta. Mengajar juga di Universitas Paramadina, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis buku Studi Strategis dan Keamanan.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN). Mengajar juga di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bung Karno. Penulis buku Handbook Sistem Politik Indonesia, Political Explore, Studi Parlemen, dan Pengantar Ilmu Politik.

## Pendahuluan

**T**errorisme menjadi sebuah istilah penting di awal abad ke-21 ini, terutama sejak peristiwa 9/11 tahun 2001 di Amerika Serikat. Terorisme menurut T.P. Thornton, adalah penciptaan ketakutan yang disengaja, biasanya melalui penggunaan tindakan-tindakan simbolis berupa kekerasan, untuk mempengaruhi sikap politik dari kelompok-kelompok tertentu (*the deliberate creation of fear, usually through the use (or threat of use) of symbolic acts of violence, to influence the political behaviour of a target group*). Sedangkan menurut Bowyer Bell, terorisme adalah senjata kaum lemah, tetapi merupakan senjata yang sangat ampuh.<sup>3</sup>

Terorisme sangat terkait dengan kekerasan dan radikalisme. Sejak memasuki milenium baru, atau lebih tepatnya sejak peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, dunia menghadapi ancaman jenis baru, yaitu ancaman gerakan radikal yang menyebar bagai virus ke seluruh dunia. Sebuah ancaman *intangible* (tidak terlihat), hampir sama dengan ciri khas Perang Dingin, yaitu perang ideologi, tetapi memiliki dampak dan spektrum ancaman yang jauh lebih luas, sehingga menysasar individu, bukan lagi negara seperti pada Perang Dingin. Karena itulah, memahami gerakan radikal, fundamental, atau teroris ini dibutuhkan pendekatan yang berbeda, yaitu melalui pendekatan keamanan manusia (*human security*)

<sup>3</sup> Rod Thornton, *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21st Century*, (UK: Polity Press, 2007), hlm. 56-57.

daripada keamanan negara (*state security*).

Di Indonesia, di era global ini, berbagai fenomena sosial, termasuk gerakan berbasis keagamaan dengan segala bentuk manifestasi dan kompleksitas permasalahannya semakin marak terjadi. Radikalisme dan terorisme kerap memicu polemik, serta pro kontra di tengah masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat yang memandang seolah-olah radikalisme dan terorisme berbasis keagamaan adalah suatu kejadian atau kondisi yang sengaja diciptakan dan direkayasa oleh pihak-pihak tertentu. Namun, di sisi lain banyak masyarakat yang merasa resah dengan semakin merebaknya gerakan radikal berbasis keagamaan ini.<sup>4</sup>

Fenomena ini sayangnya membawa Islam sebagai agama yang diidentikkan dengan kekerasan, karena banyak dari gerakan-gerakan radikal tersebut umumnya berupaya menegakkan syariat Islam. Begitu banyak gerakan Islam yang kemudian memperoleh cap sebagai organisasi radikal. Selain itu, begitu cepatnya arus media dan informasi semakin memperkaya istilah dan pengetahuan masyarakat tentang radikalisme dan juga terorisme. Kembali, hal ini mengerucut pada Islam dalam posisi yang negatif karena konstruksi yang berkembang seolah mengarah kepada hal

<sup>4</sup> Dhyah Madya Ruth, "Prolog: Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme", dalam Dhyah Madya Ruth (ed), *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010), hlm. 1.

yang demikian.<sup>5</sup>

Lebih lanjut di Indonesia, Direktur Eksekutif Wahid Institute, Yenny Wahid, mengatakan banyak sekali survei nasional yang telah dilakukan Wahid Institute terkait radikalisme agama. Berdasarkan hasil survei itu, paham radikal di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Yenny mengatakan, peningkatan tindakan radikal tersebut cukup banyak dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil survei, orang yang telah melakukan tindakan radikal di Indonesia ada sekitar 600 ribu orang atau 0,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi, kalau diproyeksikan dalam jumlah penduduk adalah sekitar 600 ribu orang, dari jumlah penduduk yang sudah punya hak memilih (di atas 17 tahun). Responden di atas 17 tahun tersebut, yang berpotensi untuk melakukan tindakan radikal ke depannya berjumlah sekitar 7.7 persen dari jumlah total penduduk Indonesia, atau sekitar 11 juta orang.<sup>6</sup>

Data ini menunjukkan bahwa tak heran cukup banyak peristiwa teror terjadi di Indonesia, khususnya sejak Peristiwa Bom Malam Natal tahun 2000, dan tentu saja pasca Bom Bali I yang menghilangkan nyawa lebih dari 200 manusia. Mulai dari al-Qaeda, ISIS, sampai Jamaah Ansharut Daulah (JAD), gerakan radikal tetap saja beredar di bumi pertiwi ini. Sebuah kondisi rawan yang sangat mengancam, baik

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Republika, "Yenny Wahid: Radikalisme di Indonesia Meningkat", dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/27/onh8yv366-yenny-wahid-radikalisme-di-indonesia-meningkat>, 27 Maret 2017, diunduh pada 10 Oktober 2017.

keamanan negara, maupun keamanan setiap manusia Indonesia.

Terkait bela negara, program usulan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ini sering menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia, terutama sejak digulirkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Bela negara sendiri adalah bagian dari pendekatan *human security*, sekalipun menggunakan terminologi "negara". Hal ini karena bela negara hanya bisa diaplikasikan dalam konteks individu, bukan kolektif ala wajib militer. Wajib militer tetap memiliki dimensi *state security* karena kepentingan negara menjadi medium utama dari implementasinya. Sedangkan, bela negara menggunakan dimensi lain, yaitu individu. Bela negara bermain dalam tataran psikologis, yaitu menyadarkan warga negara untuk membela negaranya karena dengan membela negaranya, maka secara tidak langsung ia turut membela dirinya sendiri.

Bela negara tidak sama dengan wajib militer, sekalipun diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bela negara sama sekali tidak terkandung materi-materi tentang militer sama sekali. Materi-materi terkait nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan materi-materi tentang bagaimana menghadapi ancaman di masa depan, lebih mendominasi dibandingkan materi kemiliteran. Selain itu, program bela negara memerlukan waktu sekitar satu bulan. Selama waktu tersebut, peserta akan mendapat berbagai pengetahuan dan latihan fisik, namun

tidak terlalu berat layaknya wajib militer.<sup>7</sup>

Atas dasar itulah, menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia, dibutuhkan sebuah metode pendekatan yang mikro, dengan fokus pada individu-individu yang ada dalam negara itu sendiri, bukan melakukan generalisasi, atau mobilisasi untuk kepentingan tertentu saja. Ideologi radikal juga bermain dalam ranah yang sama, malah lebih masif karena dilakukan melalui media massa, baik berupa radio, buku, majalah, internet. Selain itu, komunikasi langsung, dalam bentuk ceramah, dakwah, dan diskusi; hubungan kekeluargaan yaitu melalui bentuk pernikahan, kekerabatan dan keluarga; dan melalui lembaga pendidikan baik itu umum maupun pesantren, juga dilakukan.

Penulis menganggap masalah ke depan bangsa ini adalah ancaman yang bersifat non-konvensional, seperti radikalisme. Ideologi radikal sendiri berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru.<sup>8</sup> Untuk itu, perlu digunakan metode atau pendekatan yang lebih tepat dalam menghadapi tipe ancaman seperti ini, dimana penulis merasa bela negara adalah program yang tepat untuk dijadikan upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana program bela negara yang sudah sejak tahun 2015 terus-

<sup>7</sup> Biru Cahya Imanda, "Tahukah Kamu Bahwa Indonesia Punya Program bela Negara?", dalam <http://lebihbaik.newstipsindonesia.com/2017/06/30/8216/>, 30 Juni 2017, diunduh pada 10 Oktober 2017.

<sup>8</sup> Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012), hlm. 205.

menerus dikumandangkan oleh Kemhan, dapat digunakan sebagai metode atau pendekatan dalam menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia.

### Definisme Radikalisme

Sebelum mulai membahas bagaimana bela negara dapat berperan mencegah ancaman radikalisme, berikut adalah beberapa definisi yang terkait dengan radikalisme. Charles E. Allen berpendapat, *the term radicalization is defined as the process of adopting an extremist belief system, including the willingness to use, support, or facilitate violence, as a method to effect societal change.*<sup>9</sup> Radikalisasi adalah sebuah proses mengadopsi sistem kepercayaan ekstrim, termasuk keinginan menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan sosial. Secara umum, penggunaan kekerasan dan dampaknya dalam kehidupan sosial menjadi ciri-ciri khas dari radikalisme. Ideologi radikal berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru.<sup>10</sup>

Sebuah model radikalisasi yang cukup berpengaruh diperkenalkan oleh Quintan Wiktorowicz pada tahun 2005. Dalam penelitiannya terhadap berbagai komunitas ekstremis Muslim di Inggris, Wiktorowicz menemukan bahwa mereka yang rentan terlibat dalam kelompok terorisme adalah individu-individu yang

<sup>9</sup> Angel Rabassa, et.al., *Deradicalizing Islamist Extremists*, (USA: Rand Corporation, 2011), hlm. 1

<sup>10</sup> Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012), hlm. 205.

pemahaman ilmu agamanya kurang mendalam.<sup>11</sup>

Wiktorowicz menyatakan bahwa permulaan dari proses radikalasi yaitu pada saat seseorang mulai membuka dirinya terhadap ide-ide dan dunia baru yang dianggap benar sehingga meninggalkan pandangan lamanya. Tahap ini disebutnya sebagai *cognitive opening*. Menurut Wiktorowicz, keluhan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan personal merupakan faktor-faktor dari luar yang mendorong individu bergabung ke dalam kelompok radikal. Tahapan selanjutnya adalah *religious seeking*. Pada tahapan ini seseorang mulai mencari makna dari keagamaan. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti diskusi-diskusi maupun ceramah-ceramah, baik secara terbuka maupun tertutup.<sup>12</sup>

Dalam konteks Indonesia, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal memaksakan kehendak. Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai, tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan

tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya.<sup>13</sup>

### Definisi Bela Negara

Bela negara adalah sebuah konsep yang menarik jika dikaitkan dengan konteks sistem pertahanan Indonesia, karena sifatnya yang berbeda dengan wajib militer, seperti yang umumnya dikenal dalam konteks sistem pertahanan militer. Untuk itu, baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi bela negara yang sesuai dengan aturan undang-undang di Indonesia. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa

<sup>11</sup> Alex P. Schmid, *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*, (The Hague: International Center for Counter-Terrorism, 2013), hlm. 23.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>13</sup> Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38.

dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini tercantum dalam undang-undang pertahanan negara, di pasal 1 Ayat 1, yaitu "Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Tujuan dicanangkannya program bela negara adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki kekuatan dan kemampuan tempur yang optimal. Pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap dan berlanjut yang disusun dalam rencana strategis lima tahunan, dan disesuaikan dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan negara, serta situasi lingkungan strategis global, regional, dan tentunya juga nasional. Pencapaian perwujudan

kemampuan dan keterampilan profesional, maupun struktur kekuatan TNI yang memiliki ciri pada teknologi, dengan sendirinya memerlukan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mumpuni.<sup>14</sup>

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>15</sup>

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat

<sup>14</sup> Poerwadi, "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 221-222.

<sup>15</sup> Jerry Indrawan, "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 67.

K.J. Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.<sup>16</sup>

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru (*blue print*) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga, yaitu presiden dan parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dan peletak dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia.<sup>17</sup>

Agus Widjojo mengemukakan, bahwa dalam pendekatan konseptual untuk menyusun suatu konsepsi pertahanan negara, kita tidak mungkin terlepas dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ciri konflik masa depan, hakikat ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, serta kepentingan nasional Indonesia. Dari informasi yang didapatkan untuk menjawab semua kecenderungan itu, selanjutnya kita menentukan strategi nasional guna mencapai kepentingan nasional, khususnya untuk mendapatkan penjabaran strategi dan sasaran dalam bidang pertahanan negara.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

<sup>17</sup> Muradi, *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2012), hlm. 29.

<sup>18</sup> Agus Widjojo, "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam

## Bela Negara dan Radikalisasi

Seperti yang sudah disebutkan penulis sebelumnya, bela negara sangat terkait dengan pendekatan yang bersifat keamanan manusia. Keamanan manusia ini adalah metode yang efektif untuk menangkal ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-konvensional. Dewasa ini, isu-isu non-militer (non-konvensional) dapat menjadi isu-isu yang sangat terkait keamanan, dengan demikian dapat dikategorikan dengan status "keamanan nasional". Perubahan *the nature of security* makin terlihat jelas, terutama pasca Perang Dingin, dimana peran *state* semakin berkurang.

Ancaman non-konvensional juga terkait dengan terminologi keamanan manusia. Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, korupsi, pengungsi, krisis identitas, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, memiliki resiko keamanan jangka pendek dan juga jangka panjang. Keamanan menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu. Sifat ancaman tidak selalu berbentuk fisik, contoh berbentuk propaganda atau pidato, yang efeknya bisa membawa perlawanan sampai perubahan rezim.<sup>19</sup>

Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 44.

<sup>19</sup> Jerry Indrawan, *Studi Strategis dan Keamanan*, (Jakarta: Nadi Pustaka, 2015), hlm. 64-65.

Isu-isu non militer yang terkait keamanan ini disebut sekuritisasi (*securitization*). Isu-isu ini dapat melibatkan pihak militer dalam upaya penanganannya, seperti memerangi kejahatan narkoba, membantu operasi-operasi kemanusiaan, sampai memberantas terorisme. Ranah militer dan non-militer juga saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itulah, isu terorisme, dimana di dalamnya terdapat masalah radikalisasi, bisa kita golongan sebagai isu non-konvensional karena telah mengalami proses sekuritisasi.<sup>20</sup> Masalah pertahanan (*defense*) pun saat ini menjadi bercampur dengan keamanan (*security*), terutama terkait ancaman non-konvensional. Artinya, medan perangnya mulai melebar, mulai dari perang secara fisik (*hard power*), sampai ke tidak terlihat (*soft power*).<sup>21</sup>

Dengan demikian, bukan hanya kesiapan militer saja yang harus dilakukan sebuah negara dalam menyusun pertahanannya, melainkan juga berbagai hal di luar ancaman militer, mulai dari soal ideologi, ekonomi, sampai radikalisme. Bicara radikalisme, tentunya ancaman yang datang saat ini bukan lagi ancaman konvensional, seperti serangan militer dari negara lain. Ancaman di era global saat ini sudah sangat bersifat non-konvensional, seperti ancaman gerakan-gerakan radikal ini.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>21</sup> Indria Samego, "Kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 7-8.

Radikalisme merusak sendi-sendi sosial masyarakat sehingga masyarakat Indonesia yang cinta damai dan cinta tanah air ini bisa dimanipulasi oleh pemikiran sempit yang menghalalkan penghilangan nyawa manusia. Untuk itu, sudah selayaknya sistem pertahanan Indonesia mulai dirancang untuk menyesuaikan dengan ancaman jenis ini. Salahsatu caranya adalah dengan implementasi program bela negara. Gerakan radikal bukan sekedar kejahatan biasa, tetapi ancaman besar bagi keutuhan dan keselamatan bangsa. Jika menyinggung hal tersebut, maka lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pertahanan negara harus mengambil tindakan maksimal terhadap radikalisasi karena mengancam pertahanan negara.

Ancaman non-militer atau ancaman non-konvensional seperti radikalisme adalah tantangan baru bagi TNI, Kemhan, dan Kepolisian juga tentunya, sebagai upaya mempertahankan negara. Di satu sisi, TNI tetap harus menjaga netralitasnya dalam ranah sipil agar tidak bermain sosial politik seperti pada era Orde Baru lalu. Akan tetapi, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara sekarang sudah sangat kompleks, seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Mengandalkan Kepolisian saja tentunya adalah sebuah hal yang mustahil. TNI harus menempatkan dirinya sebagai garda pelindung bangsa, bahu-membahu bersama Kemhan dan Kepolisian mengatasi masalah ini.



Sebagai bagian dari pertahanan negara, inilah pentingnya mengajarkan bela negara sedini mungkin bagi segenap komponen bangsa, siapa pun dia. Pemahaman mendasar terhadap nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air harus dipupuk sedini mungkin. Jangan sampai generasi milenial yang setiap hari berlutut dengan gadget ini malah kehilangan jati dirinya sebagai anak bangsa. Kemajuan teknologi tidak diharamkan, justru dimanfaatkan untuk mendiseminasikan program bela negara ini. Anak-anak harus seawal mungkin diperkenalkan dengan konsep-konsep bela negara, yang salah satunya bisa dilakukan melalui aplikasi dalam *gadget-gadget* mereka.

Generasi muda adalah generasi yang paling rentan dipengaruhi, apalagi dalam nuansa gerakan radikal seperti yang dibahas dalam tulisan ini. Sasaran para pelaku gerakan radikal tentu adalah generasi muda yang melek teknologi, tetapi buta iman dan takwa. Generasi muda yang tidak lagi menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan negara, seperti Pancasila, adalah sasaran empuk terkena pengaruh radikalisme. Itulah mengapa program bela negara harus disasar kepada para generasi muda karena selain rentan didoktrin, mereka jugalah penerus bangsa ini. Tanpa mereka, habislah masa depan bangsa Indonesia. Tak heran, jika perang zaman sekarang tidak dimulai dari luar, tetapi didalam negeri sendiri. Bangsa ini dikeroposkan dari internal, diserang generasi mudanya, agar pondasi bangsa rapuh dan mampu dikuasai tanpa harus menembak sebutir peluru pun.

Kita bisa membayangkan betapa besarnya ancaman non-konvensional yang dihadapi bangsa ini saat ini, di era global seperti sekarang ini. Globalisasi justru menghadirkan spektrum ancaman yang sulit dideteksi karena bermain dalam tataran *intangible*. Jika bangsa ini tidak pintar dalam memainkan perannya dalam globalisasi, maka globalisasi akan menelan habis generasi bangsa ini. Radikalisme akan masuk dan menyebar di Indonesia melalui globalisasi jika kita tidak mampu membuat semakan filterisasi terhadapnya. Untuk itu, program bela negara harus mampu menyaring pengaruh-pengaruh jahat yang ingin merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sangat tidak sesuai dengan gerakan-gerakan radikalisme, apalagi membawa, bahkan memanfaatkan agama tertentu. Radikalisme di Indonesia saat ini sudah dianggap sebagai salah satu musuh utama bangsa, selain korupsi, karena berlawanan dengan *core value* bangsa, bertentangan dengan kepentingan nasional, mengancam eksistensi bangsa, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sesuai dengan amanah para pendiri bangsa.

Setiap *stake holder* pertahanan di Indonesia harus terlibat dalam upaya pemberantasan gerakan radikal, sekaligus membangun sistem pertahanan negara yang efektif untuk menghadapi ancaman ini. Untuk itu, program bela negara harus digalakkan sebagai bagian pencegahan berkembang pesatnya paham-paham

radikal. Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana mencegahnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar.

Ancaman radikalisme menyebar bagaikan hantu yang tidak nyata dan tidak memiliki bentuk, tetapi memiliki dampak signifikan. Kita baru dapat mendeteksi radikalisme ketika pelakunya sudah berbuat sesuatu. Manifestasi tindakannya dapat dikenai tindak pidana, baik pidana umum maupun terorisme, akan tetapi penyebarannya tidak. Sama dengan bahaya laten komunis yang sulit sekali dideteksi, maka penyebaran ajaran, aliran, atau paham dan ideologi radikal, yang biasanya dibumbui dengan kekerasan, sulit sekali untuk dideteksi keberadaannya.

Menurut Azyumardi Azra, salah satu saluran penyebaran paham radikal adalah ceramah-ceramah agama dan pendidikan di sekolah menengah atas melalui guru, yang menyampaikan ajaran Islam garis keras yang tidak mengakomodir keberagaman. Ada guru yang terpengaruh dengan paham radikal yang menyebarkan paham ini ke para murid-muridnya. Hal ini dijumpai di sejumlah sekolah menengah atas di kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, dan Makassar.<sup>22</sup>

Atas dasar itulah, metode-metode preventif harus menjadi corong utama

<sup>22</sup> BBC, "Bagaimana Meredam Paham Radikal di Indonesia", dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39494134>, 7 April 2017, diunduh pada 10 Oktober 2017.

pemberantasan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Program bela negara diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah, sesat pikir, dan mengarah pada radikalisme. Program yang diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan ini haruslah diimplementasikan secara serius dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat. Pertahanan negara yang efektif dapat terwujud jika segenap komponen bangsa telah mengikuti program bela negara. Mereka akan menempatkan negara sebagai hal yang terutama, sehingga tidak terpengaruh oleh hasutan atau bujukan untuk bergabung dalam gerakan-gerakan radikal.

Atas dasar itulah, dalam tulisan ini penulis memberikannarasi dan argumentasi bahwa untuk menghadapi ancaman radikalisme yang semakin luas di Indonesia diperlukan sebuah program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama. Dengan begitu luasnya doktrin-doktrin radikal yang sudah bermunculan di negara ini, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari serangkaian peristiwa teror, maka sudah seharusnya program bela negara menjadi salah satu dasar bagi metode pencegahan paham radikal di Indonesia.

Secara praktis, sesuai dengan program bela negara yang selama

ini sudah dilaksanakan oleh Kemhan, maupun oleh TNI, doktrinasi nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, dan tentu saja nilai-nilai religiusitas (agama) akan lebih banyak diterapkan dalam program ini. Program bela negara akan menekankan pada diseminasi nilai-nilai tadi kepada para peserta didik, yang disesuaikan untuk mencegah berkembangnya paham-paham radikal. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam program bela negara diharapkan dapat mencegah radikalisme menyebar kepada seluruh insan masyarakat. Muatan kurikulum bela negara pun harus berlandaskan pada ajaran-ajaran agama untuk mengoreksi doktrinasi radikalisme sesat yang menggunakan dalil agama.

Untuk itu, dalam materi-materi yang disampaikan di dalam program bela negara, hal-hal di atas akan lebih banyak disampaikan. Menurut penulis, proses penyampaian materi seperti ini akan efektif karena sasaran program bela negara adalah para kaum muda di Indonesia, yang bervariasi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Pemahaman tentang bahayanya gerakan-gerakan radikal harus dimulai sejak dini, bersamaan dengan diajarkannya program bela negara. Hanya saja untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, tidak harus memiliki konten yang terlalu berat. Materi-materi yang diajarkan baru terkait dengan nilai-nilai agama, nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa terlebih dahulu. Anak-anak di usia ini diibaratkan masih seperti kertas putih yang siap dituliskan tinta. Jika kita

mengajarkan perilaku yang baik, maka mereka akan mengamalkannya sampai dewasa kelak.

Sedangkan, di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, dimana generasi ini sangat rentan dengan pengaruh radikal, muatan dalam program bela negara akan diperbanyak konten yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan gerakan radikal. Beberapa pelaku gerakan radikal juga menunjukkan fakta menarik bahwa pelaku kebanyakan masih berusia muda. Keterlibatan kaum muda dalam pusaran ideologi radikalisme dan terorisme keagamaan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Selalu ada sekelompok anak muda yang secara aktif terlibat dalam setiap peristiwa kekerasan atau terorisme keagamaan, baik di tanah air maupun di belahan dunia lain.<sup>23</sup>

Menurut Silber dan Bhatt, ideologi merupakan *driver* yang memotivasi beberapa anak muda di Barat untuk menjaditerorisditempatmerekadilahirkan dan dibesarkan. Ideologi menuntun pergerakan mereka, mengidentifikasi isu-isu, menyetir rekrutmen, dan sebagai landasan atau dasar mereka bertindak. Ideologi telah memberikan inspirasi kepada beberapa kelompok teroris lokal seperti pengebom di Madrid pada bulan Maret 2004 dan pengebom di London pada bulan Juli 2005.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Masdar Hilmy, "Anak Muda Di Tengah Pusaran Radikalisme", dalam <http://www2.jawapos.com/baca/opinidetil/14907/anak-muda-di-tengah-pusaran-radikalisme>, 27 Maret 2015, diunduh pada 10 Oktober 2017

<sup>24</sup> Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, (New York: NYPD, 2007), hlm. 21-23.

Dengan demikian, dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya keterlibatan anak muda dalam pusaran ideologi radikalisme, negara perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, mendesain materi dan metode bela negara yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Kedua, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anak-anak muda melalui program pelibatan sosial (*social inclusion*). Selama ini, proses kognitif dan psikologis anak muda kurang terawasi dengan baik oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Mereka menjadi radikal karena komunikasi sosial mereka dengan orang-orang terdekat terputus. Solusinya, anak muda harus sesering-seringnya diajak berdialog dan berkomunikasi dengan orang dewasa.

Ketiga, penanaman wawasan keagamaan (religiusitas) yang terintegrasi dengan wawasan kebangsaan. Harus diakui, wawasan keagamaan anak muda selama ini lebih banyak tercerai-kan dari wawasan kebangsaan. Akibatnya, wawasan keagamaan mereka menjadi kering, harfiah, dan antisosial. Dalam kondisi semacam ini, pemahaman keagamaan bisa menimbulkan loyalitas yang terbelah (*split loyalty*) di kalangan anak muda. Loyalitas terhadap nilai-nilai keagamaan berkorelasi negatif terhadap loyalitas kenegaraan dan kebangsaan.

Seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, materi dalam bela negara harus juga dimasukkan unsur-unsur religiusitas (agama) di dalamnya. Dalam hal ini tentunya muatan agama

Islam akan lebih banyak disampaikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah warga Muslim. Bung Karno sendiri dalam pengkajiannya menemukan bahwa Islam adalah agama rasional, dan sejarah membuktikan bahwa Islam adalah agama humanis dan toleran. Dengan rasionalitas dan humanitas, Islam pernah menjadi pelopor peradaban dunia, menyerap peradaban dari luar Islam, dari Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain. Dengan demikian, Islam berkembang secara dinamis tidak berkutat pada soal hukum halal, haram, *sunnah*, dan *makruh* saja, tetapi punya ruang hukum *jaiz*, yang memberi ruang bagi dinamika kehidupan untuk berkembang.<sup>25</sup>

Rasionalisme, toleransi, dan humanisme dapat mengajarkan peserta didik bela negara bahwa radikalisme adalah tindakan yang sangat tidak rasional, karena dapat mengambil nyawa orang lain, bahkan sampai menyebarkan teror ke masyarakat luas. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak toleran dan jauh dari unsur humanisme, apalagi Islam sendiri mengajarkan tentang *ukhuwah wathaniyah* (kebangsaan). Yang dimaksud *ukhuwah wathaniyah* adalah seorang Muslim hendaknya memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak Allah. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi karena mereka satu masyarakat, sebangsa dan setanah air maka *ukhuwah* di antara

<sup>25</sup> Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*, (Jakarta: RMBOOKS, 2011), hlm. 20.

mereka harus tetap ada. Prinsip paling cocok dalam *ukhuwah* ini adalah berpijak pada “*altasamuh*” (toleransi), yaitu adanya interaksi timbal balik antarumat beragama, menghargai kebebasan beragama bagi orang yang tidak sepaham, tidak mengganggu peribadatan serta tetap menjaga *ukhuwah wathaniyah*-nya.<sup>26</sup>

Beberapa pergerakan dan organisasi bernafaskan Islam, seperti Hizbullah, Hizbul Wathan, Fisabilillah, sampai pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga mendasarkan ajarannya pada rasa cinta tanah air. Sebagai contoh, pendiri NU, KH Hasyim Asyari, pernah mengeluarkan fatwa jihad, yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad melawan penjajah Belanda pada 22 Oktober 1945. Akibat fatwa itu, meledaklah perang di Surabaya pada 10 November 1945. Menurut Zuhairi Misrawi, pada masa penjajahan Belanda, Hasyim senantiasa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh muslim dari berbagai penjuru dunia untuk melawan penjajahan.<sup>27</sup> Hal ini adalah sebuah contoh di mana religiusitas dapat digunakan sebagai unsur yang ampuh melawan radikalisme dan menanamkan semangat cinta tanah air, dan tentunya juga bela negara.

Ketika Bung Karno merumuskan Pancasila pun, nilai-nilai religiusitas sudah

<sup>26</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 184.

<sup>27</sup> Merdeka, “Ini Peran NU Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-peran-nu-dalam-perjuangan-kemerdekaan-indonesia.html>, 1 Agustus 2015, diunduh pada 25 Oktober 2017.

lekat. Terkait sila Ketuhanan, kata Bung Karno:

“Sila yang pertama tergalilah olehku hal perasaan ini: Ketuhanan di dalam arti religiusiteit. Tetapi oleh saudara-saudara pihak Islam diusulkan supaya ditambah dengan perkataan: Yang Maha Esa. Dan itu kami terima dengan segala senang hati. Maka oleh karena itulah sila yang pertama sekarang itu berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>28</sup>

Bagi Bung Karno, Islam adalah jalan hidup, bukan hanya sekedar agama. Nilai-nilai Islam harus menjadi pedoman hidup bangsa. Islam adalah cara hidup manusia terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia, sekaligus sebagai sebuah agama yang universal.<sup>29</sup> Itulah sebabnya Bung Karno mengusulkan paham nasionalisme karena beliau paham bahwa agama yang dianut hampir seluruh manusia di Indonesia ini mengajarkan juga cara hidup berbangsa dan bernegara, tidak hanya cara hidup beragama saja.

Itulah mengapa penulis menekankan pada unsur religiusitas untuk dimasukkan pada program bela negara, karena muatan agama akan selalu menjadi dasar bagi pemahaman dan pelaksanaan semangat nasionalisme, kebangsaan dan cinta tanah air. Sekalipun Islam bukan dasar negara Indonesia, tetapi lahir dan berkembangnya bangsa ini berdasarkan prinsip dan nilai Islami, yang kemudian terintegrasi dalam entitas politik bernama Indonesia.

<sup>28</sup> Soewarno, dkk, *Pancasila Bung Karno*, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), hlm. 35.

<sup>29</sup> Milastri Muzakkar, *Udah Kenal dengan Pendiri Indonesia?*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), hlm. 170.

Bela negara adalah konsep yang relevan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah air untuk menumbuhkan kesadaran anti-radikalisme. Akan tetapi, tanpa muatan-muatan religiusitas di dalamnya, benteng diri untuk menghadapi ancaman radikalisme akan mudah jebol. Agama akan menjadi filter, sekaligus penguat, bagi dasar-dasar kebangsaan dan keimanan seseorang agar mampu melawan doktrinasi-doktrinasi radikal. Analogi yang sama kita aplikasikan pada konteks negara, di mana nasionalisme dan rasa cinta tanah air saja akan terasa kering tanpa dialiri landasan religiusitas yang kuat.

Walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi semua penduduknya beragama. Religiusitas bukan hanya milik agama Islam, tetapi semua agama memiliki pengertian dan konsep religiusitasnya sendiri. Dan juga, selama 72 tahun kemerdekaannya, bangsa ini selalu mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma agama ke dalam setiap perilaku manusianya, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, sinergi antara agama dengan bela negara sangat penting untuk melakukan upaya-upaya pencegahan gerakan radikal. Modal bangsa ini sudah ada, hanya perlu diingatkan kembali, salah satunya melalui program bela negara ini.

Karena itulah, diharapkan program bela negara ke depannya tidak hanya fokus pada penguatan paham-paham berbangsa dan bernegara saja, tetapi

asimilasi dengan konsep-konsep religiusitas pun harus dilakukan. Peserta didik harus memahami bahwa bela negara dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencegah radikalisme, dengan cara diseminasi ide-ide tentang kebangsaan, nasionalisme, dan religiusitas. Jika kolaborasi ini lancar dan diefektifkan secara maksimal, maka niscaya Indonesia akan mampu memberantas pengaruh-pengaruh negatif dari radikalisme.

Selanjutnya, menurut Muhammad A.S. Hikam, dalam menghadapi ancaman gerakan radikal dibutuhkan beberapa konsepsi-konsepsi dasar yang menjadi pilar eksistensi bangsa Indonesia selama ini. Menurut penulis, konsepsi-konsepsi tersebut dapat dimasukkan ke dalam materi-materi yang diajarkan dalam bela negara. Materi-materi tersebut, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil; UUD sebagai landasan konstitusi; wawasan nusantara sebagai landasan visional; serta konsep ketahanan nasional (tahnas) dan penguatan nasionalisme di era global. Kehadiran gerakan radikal jelas bertolak belakang dari konsepsi-konsepsi tersebut. Radikalisme yang berujung pada kekerasan jelas merupakan paham yang tidak dapat tinggal dalam tatanan masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Terakhir, program bela negara menurut penulis adalah program yang sangat efektif untuk diimplementasikan di Indonesia pada era global seperti saat ini,

<sup>30</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang konsepsi-konsepsi ini, lihat Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 44-54.

dimana ancaman yang muncul tidak lagi berdimensi militer. Ancaman radikalisme menunjukkan kepada kita semua bahwa upaya pencegahannya tidak bisa dilakukan secara tradisional lagi, melainkan harus dilakukan secara kontekstual. Pencegahan harus mengombinasikan antara tindakan represif untuk memberantas pelakunya, tetapi tetap memfokuskan pada upaya preventif melalui diseminasi konsep-konsep bela negara, di mana nilai-nilai religiusitas menjadi hal yang utama. Dengan demikian, ancaman hantu tapi nyata ini akan mampu diatasi secara maksimal.

### **Kesimpulan**

Penggunaan kekerasan dan dampaknya dalam kehidupan sosial menjadi ciri-ciri khas dari radikalisme, yang dimanifestasikan melalui tindakan terorisme. Terorisme sejak peristiwa Bom Malam Natal tahun 2000 semakin banyak terjadi di Indonesia sampai hari ini. Kemudian, bela negara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Ancaman non-militer atau ancaman non-konvensional seperti radikalisme adalah tantangan baru di era global ini bagi Kemhan, TNI, dan Kepolisian juga tentunya, sebagai upaya mempertahankan negara. Setiap *stake holder* pertahanan di Indonesia harus terlibat dalam upaya

pemberantasan gerakan radikal, sekaligus membangun sistem pertahanan negara yang efektif untuk menghadapi ancaman ini. Untuk itu, program bela negara harus digalakkan sebagai bagian pencegahan berkembang pesatnya paham-paham radikal. Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana mencegahnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar.

Program bela negara diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah dan pastinya juga sesat. Bela negara harus diimplementasikan secara serius dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat. Pertahanan negara yang efektif dapat terwujud jika segenap komponen bangsa telah mengikuti program bela negara.

Dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya keterlibatan anak muda dalam pusaran ideologi radikalisme, negara perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, mendesain materi dan metode bela negara yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Kedua, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anak-anak muda melalui program pelibatan sosial (*social inclusion*). Dan ketiga, penanaman wawasan keagamaan (religiusitas) yang terintegrasi dengan wawasan kebangsaan. Muatan kurikulum bela negara pun harus berlandaskan pada

ajaran-ajaran agama untuk mengoreksi doktrinasi radikalisme sesat yang menggunakan dalil agama.

Program bela negara adalah program yang sangat efektif untuk diimplementasikan di Indonesia pada era global seperti saat ini, di mana ancaman yang muncul tidak lagi berdimensi militer. Ancaman radikalisme menunjukkan kepada kita semua bahwa upaya pencegahannya tidak bisa dilakukan secara tradisional lagi, melainkan harus dilakukan secara kontekstual. Pencegahan harus mengombinasikan antara tindakan represif untuk memberantas pelakunya, tetapi tetap memfokuskan pada metode preventif melalui diseminasi konsep-konsep bela negara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Golose, Petrus R. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Haq, Hamka. 2011. *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*. Jakarta: RMBOOKS.
- Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas.
- Holsti, Kalevi J. 1981. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall.
- Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategi dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.
- Muradi. 2012. *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Muzakkar, Milastri. 2014. *Udah Kenal dengan Pendiri Indonesia?* Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Poerwadi. 2001. "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Pulungan, Suyuthi. 2005. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ruth, Dhyah Madya. 2010. "Prolog: Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme", dalam Dhyah Madya Ruth (ed). *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru.
- Rabassa, Angel, et.al. 2011. *Deradicalizing Islamist Extremists*. USA: Rand Corporation.
- Schmid, Alex P. 2013. *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature*



Review. The Hague: International Center for Counter-Terrorism.

Silber, Michael D, dan Arvin Bhatt. 2007.

*Radicalization in the West: The Homegrown Threat*. New York: New York Police Department.

Soewarno, dkk. 2005. *Pancasila Bung Karno*. Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika.

Thornton, Rod. 2007. *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21st Century*. UK: Polity Press.

Widjojo, Agus. 2001. "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.

Zen, Fathurin. 2012. *Radikalisme Retoris*. Jakarta: Bumen Pustaka Emas.

lebihbaik.newstipsindonesia.com/2017/06/30/8216/, 30 Juni 2017, diunduh pada 10 Oktober 2017.

Merdeka, "Ini Peran NU Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-peran-nu-dalam-perjuangan-kemerdekaan-indonesia.html>, 1 Agustus 2015, diunduh pada 25 Oktober 2017.

Republika, "Yenni Wahid: Radikalisme di Indonesia Meningkat", dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/27/onh8yv366-yenny-wahid-radikalisme-di-indonesia-meningkat>, 27 Maret 2017, diunduh pada 10 Oktober 2017.

## Jurnal

Indrawan, Jerry. 2015. "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No. 1.

Samego, Indria. 2015. "Kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No. 1.

## Website

BBC, "Bagaimana Meredam Paham Radikal di Indonesia", dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39494134>, 7 April 2017, diunduh pada 10 Oktober 2017.

Hilmy, Masdar, "Anak Muda Di Tengah Pusaran Radikalisme", dalam <http://www2.jawapos.com/baca/opinidetail/14907/anak-muda-di-tengah-pusaran-radikalisme>, 27 Maret 2015, diunduh pada 10 Oktober 2017.

Imanda, Biru Cahya, "Tahukah Kamu Bahwa Indonesia Punya Program bela Negara?", dalam <http://>

